PENGADILAN AGAMA GRESIK

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik

Gresik - Jawa Timur 61121

Telp. (031) 3991193 Fax. 031 (3981685)

e-mail : pagresik@gmail.com

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik

Telp. (031) 3991193 Fax. 031 (3981685)

Gresik - Jawa Timur 61121

e-mail : pagresik@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Gresik adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Gresik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Gresik.

Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gresik, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran

MOCHAMAD ISHCAQ, S.H,
NIP. 196708171994031009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		I
Daftar Isi		III
PernyataanTanggung Jawab		IV
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	4
II.	Neraca	5
III.	Laporan Operasional	6
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	7
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	8
	A. Penjelasan Umum	8
	B. Penjelasan atas Pos-Pos LaporanRealisasi Anggaran	23
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	45
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	56
VI.	Lampiran dan Daftar	57

PENGADILAN AGAMA GRESIK
JL. Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO No. 45 GRESIK
TELEPON 031-3991193, FAXIMILE 031-3981685

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Gresik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gresik, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran

MOCHAMAD ISHCAQ, S.H,
NIP. 196708171994031009

Laporan Keuangan Kantor Pegadilan Agama Gresik Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 378.700 atau mencapai 58 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 649.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp 4.308.703.876 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.361.640.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp 18.731.509.512 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 4.931.282; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 18.726.578.230; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0; dan Rp 18.731.509.512.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (4.481.136.846);, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 4.481.478.958; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (4.481.100.258) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp (4.481.136.846) dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (4.481.136.846).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp 18.733.418.992; dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (4.481.136.846); ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0; dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 4.479.227.366; sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 18.731.509.512.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

KANTOR PENGADILAN AGAMA GRESIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR31 DESEMBER 2018 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	649.000	378.700	58,35	1.980.468
JUMLAH PENDAPATAN		**649.000**	**378.700**	**58,35**	**1.980.468**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	3.370.927.000	3.348.584.050	99,34	3.767.848.203
Belanja Barang	B.4	940.713.000	910.341.906	96,77	750.248.475
Belanja Modal	B.5	50.000.000	49.777.920	99,56	161.996.340
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		**4.361.640.000**	**4.308.703.876**	**98,79**	**4.680.093.018**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR PENGADILAN AGAMA GRESIK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	4.931.282	1.623.000
Jumlah Aset Lancar		4.931.282	1.623.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	15.929.385.000	15.929.385.000
Peralatan dan Mesin	C.15	1.868.882.416	1.648.202.306
Gedung dan Bangunan	C.16	2.649.447.000	2.649.447.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	5.255.970	5.255.970
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1.726.392.156)	(1.493.550.619)
Jumlah Aset Tetap		18.726.578.230	18.738.739.657
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	8.646.500	8.646.500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(8.646.500)	(8.646.500)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		**18.731.509.512**	**18.740.362.657**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	6.943.665
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	6.943.665
JUMLAH KEWAJIBAN		-	6.943.665
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	18.731.509.512	18.733.418.992
JUMLAH EKUITAS		18.731.509.512	18.733.418.992
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**18.731.509.512**	**18.740.362.657**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR PENGADILAN AGAMA GRESIK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	378.700	973.800
JUMLAH PENDAPATAN		**378.700**	**973.800**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.348.584.050	3.759.961.653
Beban Persediaan	D.3	23.456.280	21.621.905
Beban Barang dan Jasa	D.4	596.310.341	449.535.565
Beban Pemeliharaan	D.5	219.254.850	208.428.925
Beban Perjalanan Dinas	D.6	61.031.900	71.036.300
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	232.841.537	241.282.903
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	(5.033)
JUMLAH BEBAN		**4.481.478.958**	4.751.862.218
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(4.481.100.258)**	**(4.750.888.418)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		738.350	512.195
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(36.588)	249.345
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(4.481.136.846)**	**(4.750.639.073)**
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(4.481.136.846)**	**(4.750.639.073)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR PENGADILAN AGAMA GRESIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	18.733.418.992	42.681.067.495
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.481.136.846)	(4.750.639.073)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		(23.875.121.980)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	(23.875.122.000)
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	20
JUMLAH		-	(23.875.121.980)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.479.227.366	4.678.112.550
EKUITAS AKHIR	E.5	**18.731.509.512**	**18.733.418.992**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b. Undang- Undang Noor 1 Tahun 2004 tentan Pemeriksaan Negara.

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

g. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

233/PMK.05/011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standart.

j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.

k. Peraturan sekretaris Makamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Pusat

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Agama Gresik

Kantor Pengadilan Agama Gresik didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 45 Gresik.

Kantor Pengadilan Agama Gresik mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pengadilan Agama Gresik berkomitmen dengan

visi *"Terwujudnya Peradilan Agama Gresik Yang Agung***.***"*

Misi Pengadilan Agama Gresik:

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Gresik
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia yaitu dengan mengikut sertakkan seluruh aparat Pengadilan Agama Gresik untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dala melayani masyarakat pencari keadilan.
2. Membangun Budaya Kerja Profesional yaitu dengan menghilangkan kesan Bodoh Penghasilan Sama (PGPS).
3. Pemanfaatan Tehnologi Informasi yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Gresik sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi Pengadilan, standar prosedur berpekera serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah.
4. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan yaitu syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang enyelenggarakan perdilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalanka fungsinya (kemandirian individual / fungsional)
5. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan yaitu Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan yaitu kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak badan peradilan.
7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Gresik. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Agama Gresik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Agama Gresik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata

uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Agama Gresik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat

adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Pengadilan Agma Gresik* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	649.000	649.000
Jumlah Pendapatan	**649.000**	**649.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	3.836.117.000	3.370.927.000
Belanja Barang	796.713.000	940.713.000
Belanja Modal	25.000.000	50.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	**4.657.830.000**	**4.361.640.000**

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp 378.700;

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 378.700; atau mencapai 58.35 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 649.000; Pendapatan Kantor Pengadilan Agama Gresik terdiri dari Pendapatan Jasa

dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	649.000	378.700	58,35
Jumlah	**649.000**	**378.700**	58,35

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2019 tidak mengalami kenaikan atau penurunan persen dibandingkan TA 2018

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0,00
Pendapatan Lain-lain	378.700	378.700	0,00
Jumlah	**378.700**	**378.700**	**0,00**

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp 4.308.703.876;

Realisasi Belanja instansi pada TA 2019 adalah sebesar Rp 4.308.703.867; atau 98,8% dari anggaran belanja sebesar Rp 4.361.640.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.370.927.000	3.348.995.412	99,35
Belanja Barang	940.713.000	910.341.906	96,77
Belanja Modal	50.000.000	49.777.920	99,56
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	4.361.640.000	4.309.115.238	98,80
Pengembalian	-	(411.362)	-
Jumlah	**4.361.640.000**	**4.308.703.876**	98,79

Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penrunan sebesar 7,94% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini

disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya anggaran untuk belanja pegawai dibandingkan tahun 2018
2. Berkurangnya pengadaan belanja modal dibandingkan tahun 2018

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.348.584.050	3.767.848.203	(11,13)
Belanja Barang	910.341.906	750.248.475	21,34
Belanja Modal	49.777.920	161.996.340	(69,27)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**4.308.703.876**	**4.680.093.018**	**(7,94)**

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp 4.308.703.876

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 4.308.703.876 dan Rp 4.680.093.018 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar 11,13 persen dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Pengurangan anggaran belanja pegawai dari BUA terutama belanja uang makan sehingga tidak bisa mengajukan uang makan bulan desember 2019

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.420.933.520	1.458.678.300	(2,59)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.818	18.601	6,54
Belanja Tunj Suami/Istri PNS	116.467.742	124.403.470	(6,38)
Belanja Tunj Anak PNS	35.635.218	36.761.266	(3,06)
Belanja Tunj Struktural PNS	36.940.000	36.400.000	1,48
Belanja Tunj Fngsional PNS	1.301.675.000	1.587.045.000	(17,98)
Belanja Tunj PPH PNS	150.233.134	193.390.108	(22,32)
Belanja Tunj Beras PNS	70.174.980	77.634.240	(9,61)

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp 910.341.906;

Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 910.341.906; dan Rp 750.248.475; Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan 21,34% dari Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini antara lain disebabkan oleh meingkatnya belanja pemeliharaan berupa kenaikan anggaran listrik.

Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	476.681.209	358.394.852	33,00
Belanja Barang Non Operasional	0	14.321.000	(100,00)
Belanja Jasa	126.572.797	76.006.223	66,53
Belanja Pemeliharaan	211.708.000	198.659.600	6,57
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	61.031.900	71.036.300	(14,08)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	0	0	-
Belanja Persediaan	34.348.000	31.830.500	7,91
Jumlah Belanja Kotor	910.341.906	750.248.475	**21,34**
Pengembalian Belanja	0	0	

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp 49.777.920;

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 49.777.920; dan Rp 161.996.340; Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar 69,27% dibandingkan TA 2018 disebabkan realisasi anggran untuk belanja modal peralatan dan mesin cuma 49.777.920; berupa pengadaan laptop dan printer

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Peralatan dan Mesin	49.777.920	161.996.340	**-69,27**
Jumlah Belanja Kotor	49.777.920	161.996.340	**-69,27**
Pengembalian	0	0	0,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Realisasi tersebut pada TA 2019 tidak mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan tidak ada belanja modal tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 adalah sebesar Rp 49.777.920;, mengalami penurunan sebesar 67,27 persen bila dibandingkan dengan

realisasi TA 2018 sebesar Rp 161.996.340; Hal ini disebabkan oleh menurunnya anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	0	0	0,00
Peralatan Komputer	0	0	0,00
Lapotop	49.777.920	161.996.340	
Jumlah Belanja Kotor	**49.777.920**	**161.996.340**	**-69,27**
Pengembalian	-	-	-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Realisasi Belanja Modal TA 2019 tidak mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A 2018	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Realisasi Belanja Modal TA 2019 tidak mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0 persen

dibandingkan Realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan tidak ada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainya TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 tidak mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan tidak ada belanja modal lainnya.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp 0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada 0 TA 2019 tidak mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0% dibandingkan TA 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A 2018	NAIK (TURUN) %
NIHIL			
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0;

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 dan 2018

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Uang Tunai	-	-
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Gresik	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp 0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada

di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2019 dan 2018

Keterangan	TA 2019	TA 2018
NIHIL		
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 dan 2018

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

4 Piutang PNBP

Piutang PNBP Rp 0

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan

pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2019 dan 2018

Uraian	TH 2019	TH 2018
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp 0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2019 dan 2018

No	Nama	TH 2019	TH 2018
	NIHIL		
	Jumlah	-	-

C.6 Bagian Lancar TagihanPenjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp 0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2019 dan 2018

No	Nama	TH 2019	TH 2018
	NIHIL		
Jumlah		-	-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp 0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2019 dan 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp 0

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2019 dan 2018

Jenis	TH 2019	TH 2018
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan hak pemerintah atas

Diterima Rp 0

pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2019 dan 2018

Jenis	TH 2019	TH 2018
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.10 Persediaan

Persediaan Rp 4.931.282

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 4.931.282 dan Rp 1.623.000

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2018 dan 2019

Jenis	TH 2019	TH 2018
Barang Konsumsi	4.494.482	1.558.500
Barang untuk Pemeliharaan	436.800	64.500
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	**4.931.282**	**1.623.000**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp 0; berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR Rp 0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2019 dan 2018

No	Debitur	TH 2019	TH 2018
1			
2	NIHIL		
3			
4			
5			
6			
Jumlah		-	-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran Rp 0

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut

Rincian Tagihan TPA TA 2019 dan 2018

No	Debitur	TH 2019	TH 2018
1			
2	NIHIL		
3			
4			
5			
Jumlah		-	-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp 0

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.14 Tanah

Tanah Rp 15.929.385.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Gresik per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 15.929.385.000; dan Rp 15.929.385.000. Tidak penurunan atau kenaikan dalam aset tetap berupa tanah tahun 2019 dan 2018. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**15.929.385.000**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2019	**15.929.385.000**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2019

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1900 m2	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo no 45 Gresik	15.495.087.000
2	200 m2	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo gang XIV	434.348.000
Jumlah			**15.929.385.000**

C.15 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp 1.868.882.416

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 1.868.882.416; dan Rp 1.648.202.306; Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**1.648.202.306**
Mutasi tambah:	220.680
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2019	**1.648.422.986**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**1.648.422.986**

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa: adanya transver masuk berupa UPS, Komputer Jaringan, P.C Unit, Laptop, Printer, Server, dan Rak Server. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp 2.649.447.000

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 2.649.447.000; dan Rp 2.649.447.000; Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**2.649.447.000**
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	**2.649.447.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**2.649.447.000**

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp 0

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**-**
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**-**

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp 5.255.970;

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 5.255.970; dan Rp 5.255.970; Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**5.255.970**
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2019	**5.255.970**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**5.255.970**

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

C. 20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp (1.726.392.156)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp (1.726.392.156); dan Rp (1.493.550.619) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutanselain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2019 dan 2018

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.868.882.416	1.562.133.066	306.749.350
2	Gedung dan Bangunan	2.649.447.000	200.259.090	2.449.187.910
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	5.255.970	0	5.255.970
	Akumulasi Penyusutan	**4.523.585.386**	**1.762.392.156**	**2.761.193.230**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp 0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp 0 dan Rp 0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud

fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Gresik *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**-**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	**-**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**-**

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

RincianAset Tak berwujud TA 2019

Uraian	Nilai Perolehan
N I H I L	
Jumlah	**180.000.000**

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp 0

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 0 dan Rp 0 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	**-**
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2019	**-**
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**-**

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp (8.646.500);

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp (8.646.500); dan Rp (8.646.500); Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi	8.646.500	8.646.500	0
Jumlah	8.646.500	8.646.500	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	**8.646.500**	**8.646.500**	**0**

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjadan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 0

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 6.943.665; Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pengadilan Agama Gresik per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

RincianUtang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
NIHIL		
Total	-	

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp 0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
PT Pradnya Consultindo	2.200.000
PT. Java Prima Consultindo	5.500.000
PT Celkomindo Indonesia	5.300.000
Total	**13.000.000**

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp 0

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2019 dan TA 2018

Uraian	TH 2018	TH 2019
NIHIL		
Jumlah	-	-

C.28 Ekuitas

Ekuitas

Rp 18.731.509.512;

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 18.731.509.512; dan Rp 18.733.418.992; Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP

Rp 378.700;

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 378.700; dan Rp 973.800; Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	378.700	973.800	(61)
Jumlah	**378.700**	**973.800**	(61)

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan Sewa rumah dinas.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp 3.348.584.050;

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 3.348.584.050; dan Rp 3.759.961.653. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.420.933.520	1.458.687.300	-3
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.456	17.169	7
Beban Tunj Suami/Istri PNS	116.467.742	124.403.470	-6
Beban Tunj Anak PNS	35.635.218	36.761.266	-3
Beban Tunj Struktural PNS	36.940.000	36.400.000	1

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp 23.456.280;

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 23.456.280; dan Rp 21.621.905. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	23.456.280	21.621.905	8
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	**23.456.280**	**21.621.905**	8

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp 569.310.341;

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 596.310.341; dan Rp 449.535. Beban Barang danJasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	388.971.909	306.742.200	26,81
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	550.300	243.500	126,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	40.680.000	40.680.000	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	45.794.000	10.900.000	320,13
Beban Bahan	0	14.321.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	67.076.892	70.299.810	(4,58)
Beban Langganan Telepon	1.592.492	1.627.055	(2,12)
Beban Langganan Air	3.144.748	4.722.000	(33,40)
Beban Sewa	48.500.000	0	0,00
Jumlah	**596.310.341**	**449.535.565**	32,65

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp 219.254.850;

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 219.254.850; dan Rp 208.428.925. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya bertambahnya pemeliharaan gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	102.798.000	113.667.700	(9,56)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.250.000	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103.660.000	84.991.900	21,96
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	7.546.850	9.769.325	(22,75)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp 61.031.900;

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 61.031.900; dan Rp 71.036.300. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi perjalanan dinas ke KPPN diakibatkan karena adanya KKP sehingga anggaran UP menjadi sedikit. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	61.031.900	71.036.300	-14,08
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	**0,00**
Jumlah	**61.031.900**	**71.036.300**	**-14,08**

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Pengadilan Agama Gresik tidak ada beban barang diserahkan kepada masyarakat ditahun 2019 dan 2018. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
NIHIL			
Jumlah	**0**	**0**	0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban

Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan

Bantuan Sosial Rp 0

sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	% NAIK (TURUN)
NIHIL			
Jumlah	0	0	0,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 232.841.537;

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 232.841.537 dan Rp 241.282.903. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2019 dan 2018

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	152.737.901	161.179.267	-5,23
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	80.103.636	80.103.636	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	**232.841.537**	**241.282.903**	-5,23
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**232.841.537**	**241.282.903**	-5,23

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
NIHIL			
Jumlah	0	0	0,00

D.12 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp (36.588);

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	738.350	512.195	44,15
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	774.938	262.850	194,82
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**-36.588**	**249.345**	(114,67)

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
NIHIL			
Jumlah	**0**	**0**	0,00

Kantor Pengadilan Agama Gresik tidak ada Pos Luar biasa.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp 18.733.418.992

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 18.733.418.992 dan Rp 42.681.067.495.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO Rp (4.481.136.846)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp (4.481.136.846) dan Rp (4.750.639.073). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp 0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp 0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaaan

Jenis Persediaan	Koreksi
N I H I L	
Jumlah	-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang

Tetap Rp 0

berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp (23.875.122.000).

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

KoreksiAset Tetap Non Revaluasi Rp 0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
N I H I L	
Jumlah	-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Rp 0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 20. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi	
Koreksi Lainnya	Rp	20
Ekuitas Transaksi Lainnya	Rp	-
Pengembalian Pendapatn BLU Yahun Anggaran Lalu	Rp	-
Jumlah		20

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-

Rp 4.479.227.336;

masing sebesar Rp 4.479.227.366 dan Rp 4.678.112.550. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(378.700)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.308.703.876
Transfer Masuk	170.902.190
Transfer Keluar	-
Jumlah	**4.479.227.366**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp (378.700) sedangkan DKEL sebesar Rp 4.308.703.876;

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 170.902.190; terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Kantor Akuntansi Denpasar	33.000.000
3	Persediaan	Deputi Akuntansi	137.000.000
	Jumlah		**170.000.000**

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 0-. dari total Rp 0,- yang diterima sepanjang tahun 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
		N I H I L	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2019 disajikan pada lampiran.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp 18.731.509.512;

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 18.731.509.512; dan Rp 18.733.418.992;

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan berdasarkan Nomor: W13A17/14/KU.01/SK/01/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengadilan Agama Gresik tanggal 02 Januari 2019 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran : MOCHAMAD ISCHAQ, S.H.

Pejabat Pembuat Komitmen : SITI SOPIYAH, S.Si

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : KHIFTIYAH, S.Sos

Bendahara Pengeluaran : R. KHAIRANI

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran : MOCHAMAD ISCHAQ, S.H.

Pejabat Pembuat Komitmen : SITI SOPIYAH, S.Si

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : KHIFTIYAH, S.Sos

Bendahara Pengeluaran : R. KHAIRANI

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

Kantor Pengadilan Agama Gresik
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 31-12-2018	Beban Peny. Tahun 2019	Akm. Peny. Per 31-12-2019
A	**Tanah**					
1	Tanah	-	**0**	-	-	-
	Jumlah		**0**	**-**	**-**	**-**
B	**Peralatan dan Mesin**					
1	Alat Bantu	1	95.000	95.000	-	95.000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	441.644.051	441.644.051	-	441.644.051
3	Alat Kantor	80	191.926.020	108.200.664	23.497.804	131.698.468
4	Alat Rumah Tangga	330	392.833.120	315.049.134	37.856.584	352.905.718
5	Alat Studio	10	39.376.600	17.241.800	5.013.200	22.255.000
6	Alat Komunikasi	8	1.072.000	1.072.000	-	1.072.000
7	Komputer Unit	59	606.718.330	416.028.454	58.853.436	474.881.890
8	Peralatan Komputer	30	209.517.295	88.364.062	27.516.877	115.880.939
	Jumlah		1.883.182.416	**1.387.695.165**	**152.737.901**	**1.540.433.066**
C	**Gedung dan Bangunan**					
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2	2.580.461.000	113.018.970	75.345.980	188.364.950
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	68.986.000	7.136.484	4.757.656	11.894.140
	Jumlah		**2.649.447.000**	**120.155.454**	**80.103.636**	**200.259.090**
D	**Jaringan**					
1	Jaringan Listrik	0	0	-	-	-
2	Jaringan Telepon	0	0	-	-	-
	Jumlah		**0**	**-**	**-**	**-**
E	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**					
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	-	-	-
	Jumlah		**0**			
F	**Aset Tetap Yang Tidak Digunakan**					
1	Alat Kantor	7	683.000	683.000	-	683.500
2	Alat Rumah Tangga	25	6.183.500	6.183.500	-	6.183.500
3	Peralatan Komputer	4	3.250.000	3.250.000	-	3.250.000

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

KANTOR PENGADILAN AGAMA GRESIK
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
PER 31 DESEMBER 2019

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
				N I H I L			